

Pemetaan Sosial Kelurahan Dr. Soetomo, Surabaya: Penguatan Kampung Pancasila Dalam Membangun Kemandirian Sosial-Ekonomi Berkelanjutan

Alfi Rohmatul Hidayah¹, Moch. Abdillah Nafis², Berlian S. Hariawan³, Devy Maulidya C.³, Mayla Nazwa Putri Aisyah¹, Anisaista Binar Hadiarti¹, Gadiza Hikmatul Azizah¹

¹ Program Studi Sains Komunikasi, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, ² Departemen Statistika Bisnis, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, ³ Departemen Kimia, Fakultas Sains Analitik Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

*Corresponding author

E-mail: alfirohma@its.ac.id*

Article History:

Received: September, 2026

Revised: September, 2026

Accepted: September, 2026

Abstract: Kelurahan Dr. Soetomo di Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, merupakan wilayah yang beragam secara sosial, budaya, dan agama serta telah ditetapkan sebagai Kampung Pancasila. Keberagaman tersebut mendorong perlunya pemahaman terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memetakan kondisi sosial, mengidentifikasi potensi dan permasalahan, serta menyusun prioritas dan rekomendasi program penguatan Kampung Pancasila. Kegiatan dilaksanakan melalui survei warga, wawancara informan kunci, observasi lapangan, pemetaan partisipatif, penelaahan dokumen, serta penentuan prioritas menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil pemetaan menunjukkan berbagai potensi sosial, seperti interaksi antarwarga, gotong royong, kelembagaan masyarakat, fasilitas umum, dan aktivitas ekonomi melalui UMKM. Namun, kondisi dan keterlibatan masyarakat bervariasi antarwilayah. Berdasarkan hasil pemetaan dan AHP, partisipasi warga dalam musyawarah menjadi permasalahan prioritas utama, diikuti kendala UMKM dalam mengakses modal dan meningkatkan kapasitas serta pemerataan fasilitas umum dan pelayanan sosial. Temuan tersebut menjadi dasar penyusunan rekomendasi program sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Keywords:

Pemetaan Sosial, Kampung Pancasila, Partisipasi Masyarakat, UMKM, Kelurahan Dr. Soetomo

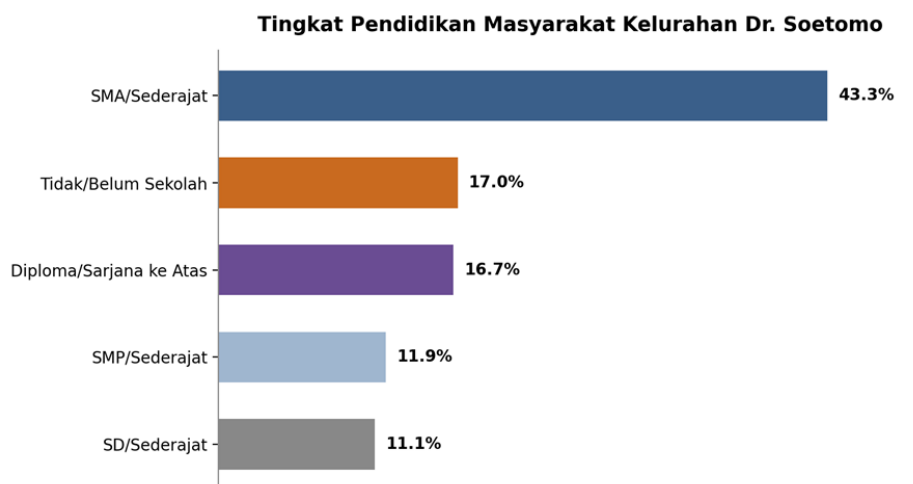
Pendahuluan

Kelurahan Dr. Soetomo merupakan salah satu dari lima kelurahan di Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, dengan luas wilayah 1,38 km² yang terbagi menjadi 14 RW dan 71 RT. Kelurahan ini dihuni oleh 15.110 jiwa dengan kepadatan

penduduk mencapai 10.949 jiwa/km² dan memiliki karakter kawasan pusat kota yang memadukan fungsi permukiman, perdagangan, jasa, perkantoran, dan bangunan bersejarah. Berdasarkan komposisi penduduknya, Kelurahan Dr. Soetomo dihuni oleh warga dengan latar belakang agama yang beragam, meliputi Islam (77,15%), Kristen (13,45%), Katholik (6,74%), Buddha (2,39%), Khonghucu (0,06%), dan Hindu (0,21%). Keberagaman etnis, agama, dan latar belakang sosial-budaya yang hidup berdampingan secara rukun inilah yang mendasari penetapan Kelurahan Dr. Soetomo sebagai Kampung Pancasila oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Gambaran umum wilayah tersebut dapat dilihat lebih rinci pada aspek pendidikan, mata pencaharian dan kondisi ekonomi, serta keberagaman agama dan sosial-budaya masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo sebagaimana didokumentasikan dalam Buku Profil Kelurahan Dr. Soetomo berikut ini.

Dari sisi pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat didominasi oleh lulusan SMA/ sederajat sebesar 43,3%, dengan sebagian penduduk telah menempuh pendidikan hingga jenjang diploma/ sarjana ke atas (16,7%), sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.

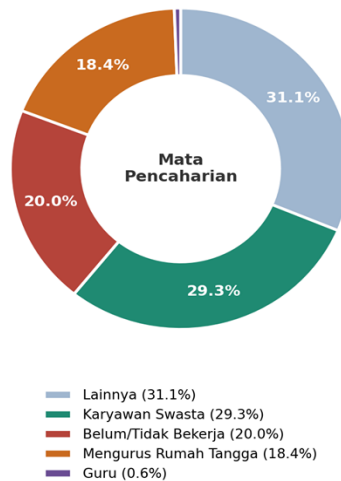


Gambar 1. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo Tahun 2025
(Sumber: Buku Profil Kelurahan Dr. Soetomo dan Pemerintah Kota Surabaya)

Dari sisi mata pencaharian, kelompok pekerjaan dengan proporsi terbesar adalah kelompok pekerjaan lainnya (PNS, guru, dokter, pedagang, buruh harian lepas, dan sejenisnya) sebesar 31,1% serta karyawan swasta sebesar 29,3%, sementara 20,0% penduduk belum/ tidak bekerja dan 18,4% mengurus rumah tangga, seperti terlihat pada Gambar 1.2. Keragaman mata pencaharian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat tidak hanya bergantung pada satu sektor, tetapi

berkembang melalui pekerjaan formal, informal, jasa, perdagangan, maupun usaha mandiri, termasuk UMKM kuliner yang tersebar di beberapa RT/RW.

Mata Pencaharian dan Kondisi Ekonomi Masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo

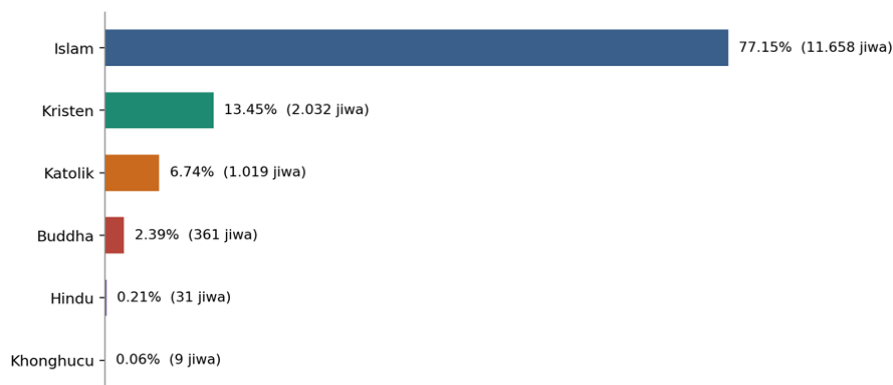


Gambar 2. Mata Pencaharian dan Kondisi Ekonomi Masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo Tahun 2025

(Sumber: Buku Profil Kelurahan Dr. Soetomo dan Pemerintah Kota Surabaya)

Dari sisi keberagaman agama, mayoritas penduduk beragama Islam sebanyak 11.658 jiwa (77,15%), diikuti oleh Kristen 2.032 jiwa (13,45%), Katolik 1.019 jiwa (6,74%), Buddha 361 jiwa (2,39%), Hindu 31 jiwa (0,21%), dan Konghucu 9 jiwa (0,06%), sebagaimana disajikan pada Gambar 1.3. Keberagaman agama dan sosial-budaya yang hidup berdampingan secara rukun ini menjadi salah satu modal sosial penting dalam penguatan Kampung Pancasila di Kelurahan Dr. Soetomo.

Keberagaman Agama Masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo (Total Penduduk 15.110 jiwa)



Gambar 3. Keberagaman Agama Masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo Tahun 2025

(Sumber: Buku Profil Kelurahan Dr. Soetomo dan Pemerintah Kota Surabaya)

Meskipun telah ditetapkan sebagai Kampung Pancasila, ketersediaan data pemetaan sosial yang mutakhir dan komprehensif di kelurahan ini masih terbatas. Data yang selama ini digunakan bersifat parsial sehingga belum mampu merepresentasikan kondisi riil kesejahteraan warga secara menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan program pemberdayaan yang dijalankan pemerintah kelurahan berisiko kurang tepat sasaran. Kebutuhan akan data yang akurat tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.

Hasil pemetaan awal menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo tidak seragam di seluruh wilayah. Warga di RW 1–7 secara umum menunjukkan interaksi sosial, partisipasi kegiatan bersama, dan praktik gotong royong yang lebih aktif dibandingkan warga RW 8–14. Permasalahan yang muncul pun berbeda karakter antar wilayah; RW 03 relatif tidak memiliki masalah sosial yang menonjol dan lebih berorientasi pada isu keamanan lingkungan, RW 04 menghadapi persoalan kenakalan remaja dan konflik rumah tangga, sedangkan RW 14 bergulat dengan persoalan keamanan, limbah usaha restoran, rendahnya partisipasi kerja bakti, serta penertiban UMKM kaki lima. Perbedaan ini menegaskan bahwa kondisi masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo tidak dapat digeneralisasi secara tunggal, melainkan perlu dipahami secara kontekstual per wilayah.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memetakan kondisi sosial masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo berdasarkan lima dimensi nilai Pancasila, mengidentifikasi potensi dan permasalahan sosial yang ada, serta menyusun prioritas dan rekomendasi program penguatan Kampung Pancasila yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Metode

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui pendekatan metode campuran (mixed methods) dengan desain sequential exploratory, yang menggabungkan data kuantitatif, kualitatif, dan partisipatif untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi sosial masyarakat.

A. Lokasi dan Waktu

1. Lokasi kegiatan: Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
2. Waktu pelaksanaan: Juli 2026, meliputi tahap studi pendahuluan, pengumpulan data lapangan (survei, observasi, pemetaan partisipatif, dan wawancara mendalam pada tanggal 15–16 Juli 2026), hingga analisis data dan penyusunan rekomendasi program.
3. Sasaran/mitra: Perangkat Kelurahan Dr. Soetomo, Ketua RT/RW, kader PKK, pengurus Karang Taruna, tokoh masyarakat dan tokoh agama, pelaku UMKM lokal, serta kelompok rentan seperti lansia, difabel, dan keluarga kurang mampu.
4. Jumlah peserta/pihak yang terlibat: 150 responden survei yang tersebar di 14 RW, informan wawancara mendalam dari RW 03, RW 04, dan RW 14, serta sejumlah stakeholder kelurahan sebagai responden penilaian AHP.

B. Tahapan Pelaksanaan



Gambar 2. Diagram Alir Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo (Sumber: Penulis)

Tahap 1 Identifikasi kondisi awal. Kondisi awal masyarakat diketahui melalui studi pendahuluan berupa kunjungan awal ke kelurahan, komunikasi dengan perangkat kelurahan, serta telaah dokumen sekunder seperti profil kelurahan, data monografi, dan data kependudukan.

Tahap 2 Perencanaan. Tim pengabdian menyusun instrumen pemetaan sosial berdasarkan lima dimensi nilai Pancasila, meliputi kuesioner survei berskala Likert 1–5, pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, format pemetaan partisipatif, dan kuesioner perbandingan berpasangan AHP. Instrumen survei diuji validitas isi oleh ahli serta diuji reliabilitasnya menggunakan Cronbach's Alpha sebelum digunakan di lapangan.

Tahap 3 Pelaksanaan. Tim melaksanakan survei kuantitatif kepada 150 warga secara proporsional di 14 RW, observasi sosial pada ruang interaksi warga (balai RW, kegiatan posyandu, PKK, Karang Taruna, dan forum warga), pemetaan partisipatif untuk mengetahui persebaran masalah sosial per wilayah, serta wawancara mendalam dengan informan kunci di RW 03, RW 04, dan RW 14 pada 15–16 Juli 2026. Penilaian prioritas masalah dilakukan bersama stakeholder lokal menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP).

Tahap 4 Evaluasi dan refleksi. Seluruh data dari survei, wawancara, observasi, pemetaan partisipatif, dan AHP diintegrasikan dan disintesis untuk menghasilkan peta masalah sosial, profil tingkat masalah pada setiap dimensi Pancasila, ranking prioritas masalah, serta rekomendasi program penguatan Kampung Pancasila yang kontekstual bagi tiap wilayah.

C. Bentuk Kegiatan dan Keterlibatan Masyarakat

Kegiatan pengabdian ini secara khusus berbentuk pemetaan sosial partisipatif, bukan pelatihan, penyuluhan, maupun pendampingan, karena tahap ini merupakan tahap dasar untuk menyusun basis data dan prioritas masalah sebelum program intervensi lanjutan dirancang. Pihak yang terlibat meliputi warga sebagai responden dan informan, Ketua RT/RW sebagai penghubung lapangan, kader PKK, pengurus Karang Taruna, tokoh masyarakat/agama, dan pelaku UMKM sebagai informan kunci maupun peserta penilaian AHP. Peran tim pengabdian (dosen dan mahasiswa) adalah sebagai perancang instrumen, pengumpul data, fasilitator kegiatan wawancara dan penilaian AHP, serta penganalisis data hingga penyusun peta masalah sosial dan rekomendasi program. Masyarakat berperan aktif sebagai sumber data primer sekaligus pemberi penilaian atas prioritas masalah yang paling relevan dengan kondisi wilayah mereka. Media dan alat yang digunakan meliputi kuesioner survei berskala Likert, pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi lapangan,

peta sederhana kelurahan untuk pemetaan partisipatif, serta matriks perbandingan berpasangan untuk analisis AHP.

Hasil

Kegiatan pemetaan sosial menghasilkan gambaran mengenai kondisi, permasalahan, dan potensi masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo berdasarkan hasil survei, observasi, wawancara, pemetaan partisipatif, serta Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat, memetakan permasalahan berdasarkan wilayah, serta menentukan prioritas masalah sebagai dasar penyusunan rekomendasi program pemberdayaan.

A. Kondisi Awal Masyarakat

Sebelum kegiatan pemetaan sosial dilaksanakan, kondisi masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo menunjukkan adanya potensi sosial dan kelembagaan yang cukup beragam, namun tingkat keterlibatan masyarakat dan kondisi sosial belum sepenuhnya seragam antarkawasan. Perbedaan tersebut terlihat pada pola interaksi, partisipasi dalam kegiatan bersama, gotong royong, serta komunikasi antara warga dan pengurus lingkungan.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pemangku kebijakan sekitar, telah ditemukan temuan pada wilayah RW 1–7 yang dimana masyarakat cenderung menunjukkan interaksi sosial yang lebih aktif, partisipasi yang lebih tinggi dalam kegiatan bersama, serta praktik gotong royong dan komunikasi antarwarga maupun dengan pengurus lingkungan yang relatif lebih baik. Sementara itu, pada wilayah RW 8–14, tingkat keterlibatan dalam beberapa aspek tersebut cenderung lebih rendah sehingga menunjukkan adanya kesenjangan partisipasi sosial antarkawasan. Selain aspek interaksi dan partisipasi, hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo memiliki kepedulian terhadap kelompok rentan dan memberikan ruang bagi kelompok tersebut untuk terlibat dalam berbagai aktivitas sosial. Kondisi fasilitas umum secara umum juga tergolong layak, dengan adanya respons pemerintah setempat terhadap kerusakan fasilitas melalui proses penanganan dan perbaikan.

Kondisi awal Kelurahan Dr. Soetomo dapat dipahami sebagai masyarakat yang memiliki potensi sosial, kepedulian, serta kapasitas kelembagaan yang cukup baik, tetapi masih terdapat perbedaan tingkat partisipasi dan interaksi sosial antar

kawasan. Temuan awal tersebut menjadi dasar penting bagi pelaksanaan pemetaan sosial untuk mengidentifikasi lebih lanjut potensi, kebutuhan, dan permasalahan yang sesuai dengan karakteristi wilayah kelurahan Dr. Soetomo.



Gambar 3. Proses Observasi dan Wawancara Masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo
(Sumber: Penulis)

B. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui rangkaian kegiatan pemetaan sosial di Kelurahan Dr. Soetomo dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan setempat. Kegiatan dilaksanakan secara bertahap mulai dari pengumpulan data hingga penentuan prioritas permasalahan sosial sebagai dasar penyusunan rekomendasi program.

1. Kegiatan Awal

Kegiatan diawali dengan pengumpulan informasi mengenai kondisi sosial masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo melalui survei dan penelusuran kondisi wilayah. Pada tahap ini, tim mengidentifikasi karakteristik masyarakat, potensi sosial, serta permasalahan yang berkembang di lingkungan warga. Pengumpulan informasi juga dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan di tingkat kelurahan dan lingkungan RT/RW. Hasil pengumpulan informasi menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo memiliki karakteristik sosial yang beragam pada antar kawasan. Di RW 03, masyarakat relatif aktif dalam kegiatan lingkungan, seperti musyawarah, kerja bakti, PKK, pengajian, posyandu, serta berbagai kegiatan pengembangan potensi warga. Meskipun demikian, tingkat kehadiran dalam musyawarah masih sekitar 60 persen sehingga partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata. Di RW 04, karakteristik masyarakat ditandai dengan hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, keterbukaan dalam berdiskusi, serta kecenderungan menyelesaikan persoalan melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah. Sementara itu, RW 14 memiliki karakteristik lingkungan yang lebih beragam dengan

keberadaan tempat ibadah, sekolah, UMKM, serta berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Dari sisi potensi, masing-masing wilayah memiliki modal sosial yang dapat dikembangkan. RW 03 memiliki potensi gotong royong, kegiatan PKK, pengajian, posyandu, pelatihan membatik, kegiatan kreatif, serta keberadaan UMKM. RW 04 memiliki potensi solidaritas dan kekeluargaan masyarakat yang tercermin melalui kegiatan sedekah bulanan, kerja bakti, musyawarah, serta kepedulian warga dalam membantu masyarakat yang mengalami musibah. Sementara itu, RW 14 memiliki potensi berupa keberagaman fasilitas sosial, pelatihan bagi lansia dan penyandang disabilitas, serta keberadaan UMKM yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari penguatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Di sisi lain, ditemukan sejumlah permasalahan yang memiliki karakteristik berbeda pada setiap wilayah. RW 03 tidak menunjukkan permasalahan sosial yang menonjol, namun masih terdapat kebutuhan penguatan keamanan lingkungan, khususnya melalui pemasangan CCTV dan penutupan gerbang pada malam hari. RW 04 menghadapi permasalahan berupa perilaku remaja atau anak-anak yang menimbulkan keributan serta konflik rumah tangga yang memerlukan penyelesaian melalui pendekatan kekeluargaan. Adapun RW 14 menghadapi persoalan yang lebih beragam, antara lain kejadian pencurian, bau dan pembuangan limbah dari restoran di sekitar pemukiman, rendahnya keterlibatan warga dalam kerja bakti, serta persoalan UMKM jalanan dengan Satpol PP. Temuan tersebut juga menunjukkan adanya beberapa hambatan dalam penyelesaian masalah, seperti belum meratanya partisipasi warga, keterbatasan sarana pertemuan di tingkat RW, koordinasi antar pihak yang belum selalu mudah, serta adanya perbedaan kepentingan dalam menangani persoalan keamanan dan lingkungan.

2. Proses Pelaksanaan

Proses pelaksanaan pemetaan sosial dilakukan secara bertahap dengan menggabungkan data kuantitatif, kualitatif, partisipatif, dan kontekstual. Berdasarkan rancangan kegiatan, proses diawali dengan studi pendahuluan dan telaah data wilayah untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi sosial Kelurahan Dr. Soetomo. Pada tahap ini dilakukan kunjungan awal, komunikasi dengan pihak kelurahan, telaah terhadap data wilayah, serta identifikasi awal terhadap isu sosial yang dianggap penting. Tahap pendahuluan juga digunakan untuk memahami karakteristik sosial wilayah, menentukan kelompok sasaran, menyesuaikan instrumen dengan kondisi masyarakat, serta membangun komunikasi

dengan stakeholder kelurahan.

Setelah tahap pendahuluan, pengumpulan data dilakukan melalui survei kuantitatif kepada warga Kelurahan Dr. Soetomo. Survei digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat permasalahan sosial berdasarkan persepsi warga dengan menggunakan instrumen skala Likert 1–5. Pernyataan dalam survei mencakup beberapa kondisi sosial, seperti hubungan antarwarga dengan latar belakang berbeda, kepedulian terhadap warga yang mengalami kesulitan, partisipasi dalam gotong royong dan musyawarah, pemerataan akses informasi atau bantuan sosial, keterlibatan kelompok masyarakat dalam kegiatan sosial, perhatian terhadap kelompok rentan, serta komunikasi dalam penyelesaian konflik. Skor yang diperoleh dari survei selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar untuk melihat tingkat masalah sosial pada setiap dimensi Pancasila.

Pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi sosial dengan melihat secara langsung kondisi dan pola interaksi masyarakat. Observasi diarahkan pada ruang-ruang interaksi masyarakat, seperti balai RW, balai kelurahan, lingkungan permukiman, kegiatan warga, kegiatan keagamaan, posyandu, kegiatan PKK, Karang Taruna, forum warga, dan kegiatan gotong royong. Aspek yang diamati meliputi pola interaksi antarwarga, tingkat partisipasi dalam kegiatan bersama, keterlibatan kelompok rentan, praktik gotong royong, sikap saling menghargai dalam forum warga, pola komunikasi antara warga dan pengurus lingkungan, akses terhadap informasi sosial, kondisi fasilitas umum, respons terhadap permasalahan sosial, serta potensi konflik atau eksklusi sosial. Hasil pengamatan kemudian dicatat melalui lembar observasi dan catatan lapangan.

Selain observasi, dilakukan pemetaan partisipatif untuk mengetahui persebaran permasalahan sosial berdasarkan wilayah atau ruang sosial tertentu. Dalam proses ini, warga atau stakeholder dilibatkan untuk mengidentifikasi titik, kelompok, maupun area yang dianggap memiliki kondisi sosial tertentu. Pemetaan dapat dilakukan menggunakan peta sederhana Kelurahan Dr. Soetomo atau matriks berbasis RT/RW. Aspek yang diperhatikan meliputi area dengan partisipasi warga yang rendah, kebutuhan sosial yang tinggi, potensi konflik sosial, keberadaan kelompok rentan, praktik gotong royong yang kuat, akses informasi atau bantuan yang belum optimal, serta potensi lokal yang dapat digunakan untuk mendukung program sosial. Hasil dari proses tersebut digunakan dalam penyusunan peta masalah sosial berbasis wilayah.

Wawancara mendalam dilakukan kepada informan kunci untuk memperoleh

penjelasan yang lebih mendalam mengenai konteks, penyebab, dan dinamika permasalahan sosial. Informasi yang digali meliputi masalah sosial yang sering muncul dan dirasakan warga, kelompok yang terdampak, penyebab masalah, pola komunikasi antarwarga, partisipasi warga dalam kegiatan kelurahan atau RT/RW, praktik gotong royong, keterlibatan kelompok dalam kegiatan sosial, mekanisme musyawarah dan pengambilan keputusan, serta kebutuhan program untuk memperkuat nilai sosial dan Pancasila. Data lapangan tersebut juga diperkuat melalui telaah dokumen yang tersedia, seperti profil kelurahan, monografi, data kependudukan, laporan kegiatan, data sosial, dokumentasi program, dan arsip kegiatan warga.

3. Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pemetaan sosial karena data tidak hanya diperoleh melalui dokumen atau pengamatan peneliti, tetapi juga melalui informasi yang diberikan langsung oleh warga dan stakeholder lokal. Subjek dan informan yang dilibatkan terdiri atas warga Kelurahan Dr. Soetomo serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Unsur tersebut meliputi ketua RT/RW, perangkat kelurahan, kader PKK, kader kesehatan atau kader sosial, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda atau Karang Taruna, pelaku UMKM lokal, perwakilan kelompok perempuan, lansia, kelompok rentan, pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan, serta pakar atau stakeholder yang memahami isu sosial masyarakat perkotaan.

Bentuk keterlibatan masyarakat disesuaikan dengan metode pengumpulan data. Warga memberikan informasi mengenai kondisi sosial lingkungan melalui survei, sedangkan informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, posisi sosial, atau keterlibatan tertentu dalam masyarakat dapat memberikan informasi lebih mendalam melalui wawancara. Dalam observasi sosial, kegiatan dan interaksi warga menjadi bagian dari kondisi sosial yang diamati. Sementara itu, melalui pemetaan partisipatif, warga atau stakeholder dilibatkan secara langsung untuk membantu mengidentifikasi wilayah, kelompok, atau area yang berkaitan dengan kondisi maupun permasalahan sosial di lingkungan Kelurahan Dr. Soetomo. Pelibatan berbagai unsur masyarakat tersebut dilakukan agar informasi yang diperoleh tidak hanya menggambarkan persepsi masyarakat secara umum, tetapi juga mencerminkan pandangan aktor-aktor sosial yang memiliki peran dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kondisi sosial dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari warga, pengurus lingkungan, lembaga masyarakat,

kelompok tertentu, maupun stakeholder yang memahami permasalahan sosial setempat.

4. Kegiatan Inti

Kegiatan inti dalam pemetaan sosial dilakukan melalui pengolahan dan analisis terhadap data yang telah diperoleh dari berbagai metode. Data hasil survei dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menghitung skor setiap item, skor rata-rata setiap indikator, skor rata-rata setiap dimensi Pancasila, skor total masalah sosial, dan kategori tingkat masalah sosial. Karena item survei disusun dalam bentuk pernyataan masalah, semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan bahwa permasalahan tersebut semakin kuat dirasakan oleh warga. Analisis juga dapat dilakukan berdasarkan kelompok responden, seperti usia, jenis kelamin, wilayah RT/RW, pekerjaan, lama tinggal, maupun tingkat keterlibatan dalam kegiatan masyarakat.

Hasil survei kemudian dihubungkan dengan hasil observasi dan pemetaan partisipatif untuk menyusun peta masalah sosial. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk matriks yang memuat dimensi Pancasila, jenis masalah sosial, skor dan kategori masalah, wilayah atau kelompok terdampak, dugaan akar masalah, serta kebutuhan program. Apabila data berdasarkan RT/RW tersedia, hasil pemetaan juga dapat disajikan dalam bentuk peta tematik sederhana untuk menggambarkan persebaran masalah sosial berdasarkan wilayah.

Sementara itu, data wawancara, observasi, dan telaah dokumen dianalisis menggunakan analisis tematik. Proses analisis dilakukan melalui transkripsi data, pembacaan data secara berulang, pemberian kode terhadap pernyataan penting, pengelompokan kode ke dalam tema, penyusunan kategori masalah, penafsiran hubungan antara tema, dan penyusunan narasi temuan. Tema yang menjadi perhatian meliputi bentuk masalah sosial, akar penyebab, pola relasi sosial, kelompok terdampak, nilai Pancasila yang berkaitan dengan masalah, hambatan penyelesaian, potensi lokal, serta usulan intervensi.

Setelah masalah sosial diperoleh dari proses pengumpulan dan analisis data, Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk membantu menentukan prioritas penanganan masalah sosial. Alternatif masalah yang dinilai dalam AHP tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi ditetapkan berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan. Penilaian dilakukan berdasarkan tujuh kriteria, yaitu tingkat urgensi masalah, jumlah warga yang terdampak, dampak jangka panjang terhadap kehidupan sosial, potensi masalah untuk memburuk, kesesuaian dengan nilai-nilai

Pancasila, kemungkinan intervensi atau penyelesaian, serta ketersediaan potensi lokal untuk menyelesaikan masalah.

Proses AHP dilakukan melalui penyusunan hirarki keputusan, penentuan kriteria penilaian, penentuan alternatif masalah berdasarkan temuan lapangan, penyusunan matriks perbandingan berpasangan, penghitungan bobot prioritas kriteria dan alternatif, pengujian konsistensi jawaban, serta penentuan ranking prioritas masalah sosial. Hasil AHP kemudian digunakan sebagai salah satu dasar untuk menentukan masalah sosial yang menjadi fokus utama dalam penyusunan program intervensi di Kelurahan Dr. Soetomo.

5. Kegiatan Akhir

Tahap akhir dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh data yang telah diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, pemetaan partisipatif, telaah dokumen, dan AHP. Integrasi dilakukan untuk menghubungkan temuan dari masing-masing metode sehingga hasil pemetaan tidak hanya menunjukkan data dalam bentuk angka, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai kondisi sosial, konteks masalah, persebaran masalah, serta prioritas penanganannya. Dalam rancangan penelitian, integrasi tersebut disusun dalam bentuk sintesis yang menghubungkan temuan survei, wawancara, observasi, hasil pemetaan, hasil AHP, kesimpulan, dan rekomendasi.

Melalui proses integrasi tersebut, pemetaan diarahkan untuk menghasilkan peta masalah sosial Kelurahan Dr. Soetomo berbasis nilai-nilai Pancasila, profil tingkat masalah sosial pada setiap dimensi Pancasila, identifikasi masalah sosial dominan, akar penyebab masalah sosial, kelompok terdampak dan aktor sosial terkait, persebaran masalah berdasarkan wilayah atau kelompok, ranking prioritas masalah berdasarkan AHP, serta rekomendasi program intervensi berbasis nilai Pancasila. Hasil pemetaan tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program sosial dan pemberdayaan yang menyesuaikan kondisi serta kebutuhan masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo.



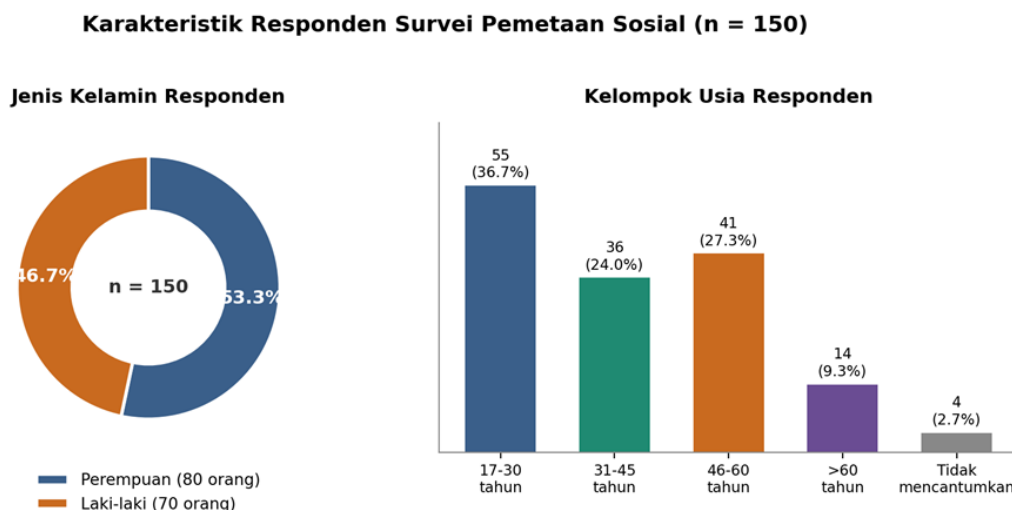
Gambar 4. Proses Pengambilan Data bersama Bapak Harijono RT 14 Dr. Soetomo
(Sumber: Penulis)

C. Hasil yang Diperoleh

Hasil kegiatan menunjukkan adanya perbedaan kondisi sosial dan tingkat keterlibatan masyarakat antar kawasan. Pemetaan menghasilkan identifikasi tiga permasalahan utama, yaitu partisipasi warga dalam musyawarah yang belum optimal, keterbatasan pelaku UMKM dalam memperoleh modal dan peningkatan kapasitas, serta pemerataan fasilitas umum dan pelayanan sosial yang belum sepenuhnya dirasakan seluruh warga. Berdasarkan AHP, partisipasi warga dalam musyawarah menjadi prioritas pertama dengan bobot 0,40, diikuti permasalahan UMKM sebesar 0,33 dan pemerataan fasilitas umum serta pelayanan sosial sebesar 0,27. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar penyusunan rekomendasi program yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.

Untuk memperkuat penyajian hasil pemetaan, data survei dan hasil AHP yang telah didokumentasikan pada Buku Profil Kelurahan Dr. Soetomo disajikan pula dalam bentuk grafik berikut ini.

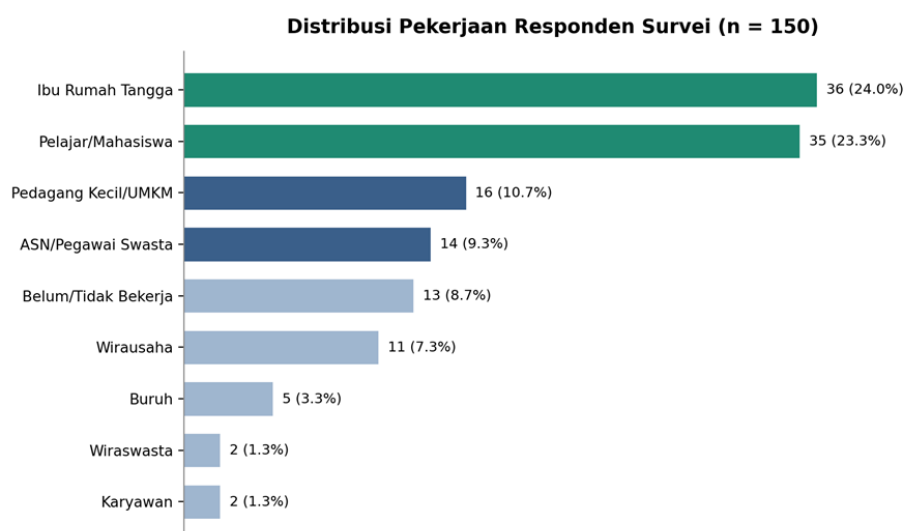
Dari 150 responden survei yang tersebar di 14 RW, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan dan berada pada kelompok usia produktif 17–30 tahun, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.3.



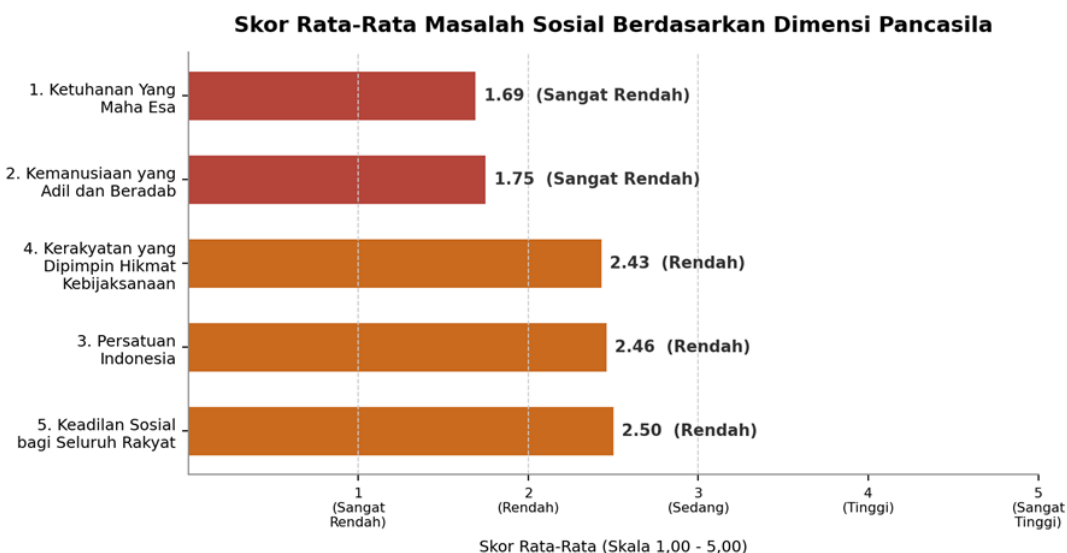
Gambar 5. Karakteristik Responden Survei Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia (n = 150)

(Sumber: Buku Profil Kelurahan Dr. Soetomo, 2026)

Ditinjau dari jenis pekerjaan, proporsi terbesar responden merupakan ibu rumah tangga dan pelajar/mahasiswa, diikuti oleh pedagang kecil/UMKM dan ASN/pegawai swasta, seperti terlihat pada Gambar 3.4.

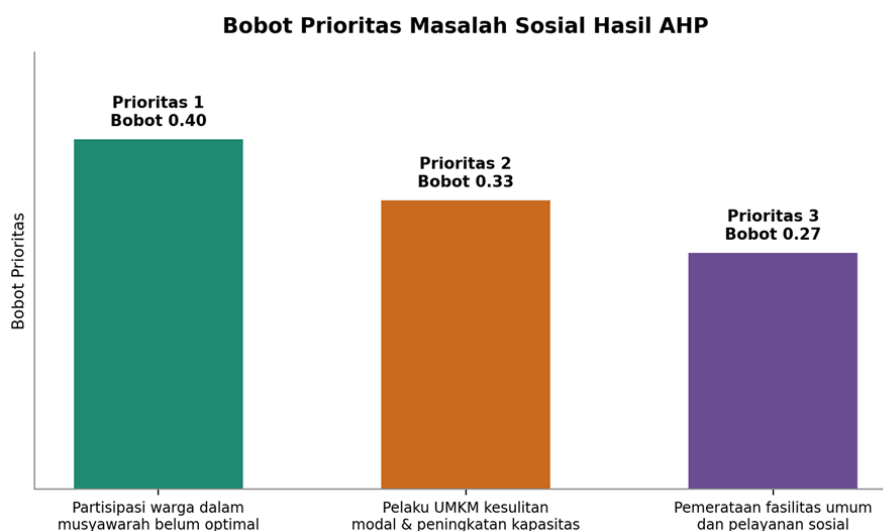


Hasil pengukuran skor rata-rata masalah sosial pada lima dimensi Pancasila menunjukkan bahwa dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab berada pada kategori sangat rendah, sedangkan dimensi Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, dan Keadilan Sosial berada pada kategori rendah, sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 3.5.



Gambar 6. Skor Rata-Rata Masalah Sosial Berdasarkan Lima Dimensi Pancasila
(Sumber: Buku Profil Kelurahan Dr. Soetomo, 2026)

Hasil Analytical Hierarchy Process (AHP) mengonfirmasi bahwa permasalahan partisipasi warga dalam musyawarah menempati prioritas tertinggi dengan bobot 0,40, diikuti oleh permasalahan permodalan dan kapasitas pelaku UMKM dengan bobot 0,33, serta pemerataan fasilitas umum dan pelayanan sosial dengan bobot 0,27, sebagaimana disajikan pada Gambar 3.6.



Gambar 7. Bobot Prioritas Masalah Sosial Berdasarkan Hasil Analytical Hierarchy Process (AHP)
(Sumber: Buku Profil Kelurahan Dr. Soetomo, 2026)

Diskusi

Hasil pemetaan sosial di Kelurahan Dr. Soetomo menunjukkan bahwa kondisi

masyarakat tidak hanya dapat dipahami melalui keberadaan permasalahan sosial, tetapi juga melalui potensi yang dimiliki masyarakat untuk merespons permasalahan tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan kegiatan yang menempatkan data pemetaan sosial sebagai dasar dalam menyusun program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran. Dalam proposal, pemetaan sosial memang diarahkan untuk menghasilkan gambaran mengenai bentuk masalah sosial, tingkat intensitasnya, kelompok yang terdampak, hingga rekomendasi program intervensi berbasis nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, hasil pemetaan dapat dimaknai sebagai informasi awal untuk memahami kondisi sosial masyarakat secara lebih menyeluruh, bukan hanya sebagai data administratif.

Temuan mengenai perlunya penguatan forum musyawarah menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial di tingkat kelurahan. Dalam instrumen pemetaan yang dirancang pada proposal, salah satu permasalahan yang diamati adalah belum meratanya kesempatan warga dalam menyampaikan pendapat pada forum musyawarah. Selain itu, mekanisme musyawarah dan pengambilan keputusan juga menjadi salah satu aspek yang digali melalui wawancara mendalam. Oleh karena itu, penguatan forum musyawarah tidak hanya dimaknai sebagai penambahan kegiatan pertemuan, tetapi sebagai upaya untuk menciptakan ruang partisipasi yang memungkinkan berbagai kelompok masyarakat terlibat dalam menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang mereka hadapi.

Kebutuhan terhadap penguatan musyawarah juga berkaitan dengan nilai persatuan dan musyawarah yang menjadi bagian dari kerangka pemetaan berbasis Pancasila. Proposal menempatkan lima sila Pancasila sebagai dimensi untuk melihat kesenjangan antara kondisi sosial yang ideal dengan realitas sosial masyarakat. Dengan perspektif tersebut, forum musyawarah dapat dipahami sebagai salah satu ruang untuk memperkuat hubungan sosial sekaligus membangun proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif. Artinya, keberadaan forum tidak cukup hanya dilihat dari ada atau tidaknya kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana forum tersebut dapat menjadi ruang komunikasi antara warga, pengurus lingkungan, dan pihak kelurahan.

Hasil pemetaan juga mengarah pada pentingnya peningkatan kapasitas dan pendampingan kelompok masyarakat dalam bidang ekonomi, khususnya UMKM. Hal ini memiliki keterkaitan dengan permasalahan awal yang diidentifikasi dalam proposal, yaitu masih rendahnya kapasitas sosial-ekonomi sebagian warga, terutama kelompok ibu rumah tangga dan pemuda yang belum memiliki akses pada kegiatan

produktif. Dengan demikian, kebutuhan terhadap penguatan kapasitas ekonomi dapat dimaknai bukan semata-mata sebagai kebutuhan untuk meningkatkan aktivitas usaha, tetapi sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan produktif.

Pendekatan tersebut sesuai dengan konsep pemberdayaan berbasis aset komunitas atau asset-based community development (ABCD) yang digunakan dalam kegiatan. Pendekatan ini menempatkan potensi yang telah dimiliki masyarakat sebagai dasar untuk dikembangkan, bukan hanya berfokus pada kekurangan yang ada. Dalam konteks Kelurahan Dr. Soetomo, penguatan UMKM dan kelompok produktif dapat dipandang sebagai bentuk pemanfaatan potensi masyarakat untuk mendukung kemandirian sosial-ekonomi. Karena itu, pendampingan menjadi penting agar potensi tersebut tidak berhenti pada identifikasi, tetapi dapat diarahkan menjadi kapasitas yang lebih berkelanjutan.

Selain aspek partisipasi dan ekonomi, hasil pemetaan juga memberikan perhatian terhadap pemerataan pelayanan. Dalam rancangan instrumen survei, akses terhadap informasi atau bantuan sosial yang belum selalu merata menjadi salah satu permasalahan yang diukur. Proposal juga memasukkan akses warga terhadap informasi sosial sebagai salah satu aspek yang diamati dalam observasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pelayanan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan layanan, tetapi juga dengan kemampuan setiap kelompok masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengakses layanan yang tersedia.

Persoalan pemerataan pelayanan dapat dimaknai dalam kerangka keadilan sosial. Ketika akses terhadap informasi, bantuan, atau pelayanan belum dirasakan secara merata, maka terdapat kebutuhan untuk memperkuat mekanisme penyampaian informasi dan menjangkau kelompok masyarakat yang berpotensi kurang terlibat. Proposal sendiri menempatkan kepedulian terhadap kelompok rentan, pemerataan akses informasi dan bantuan sosial, serta keterlibatan kelompok masyarakat sebagai bagian dari alternatif masalah sosial yang dapat menjadi prioritas penanganan. Dengan demikian, penguatan pelayanan perlu diarahkan pada upaya memastikan bahwa manfaat program dapat diterima oleh masyarakat secara lebih merata.

Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa permasalahan sosial di Kelurahan Dr. Soetomo memiliki keterkaitan antara aspek partisipasi, kapasitas ekonomi, dan akses pelayanan. Ketiga aspek tersebut tidak sebaiknya dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Keterbatasan partisipasi dapat memengaruhi

kemampuan masyarakat menyampaikan kebutuhan, sementara keterbatasan kapasitas ekonomi dan akses informasi dapat memengaruhi kesempatan warga untuk memperoleh manfaat dari program yang tersedia. Karena itu, pemetaan hasil perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu melihat hubungan antara kondisi masyarakat, kapasitas yang dimiliki, serta lingkungan sosial yang mendukung atau menghambat pemberdayaan.

Temuan tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya penggunaan data sebagai dasar perencanaan program pemberdayaan. Permasalahan yang ditemukan melalui pemetaan tidak langsung digunakan untuk menentukan intervensi, tetapi perlu dipahami berdasarkan tingkat masalah, kelompok yang terdampak, dugaan akar masalah, dan kebutuhan program. Proposal secara khusus merancang integrasi antara hasil survei, wawancara, observasi, pemetaan partisipatif, telaah dokumen, dan AHP agar hasil penelitian tidak hanya berbasis angka, tetapi juga memiliki penjelasan sosial yang kuat. Dengan pendekatan tersebut, program yang dirumuskan dapat lebih mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat.

Dengan demikian, pemetaan sosial di Kelurahan Dr. Soetomo memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar menghasilkan data mengenai kondisi masyarakat. Pemetaan menjadi proses untuk memahami permasalahan sekaligus mengenali potensi yang dapat dikembangkan melalui pemberdayaan. Hal tersebut sejalan dengan luaran yang dirancang dalam proposal, yaitu menghasilkan peta masalah sosial, profil tingkat masalah pada setiap dimensi Pancasila, identifikasi masalah dominan dan akar penyebab, kelompok terdampak, persebaran masalah, ranking prioritas, serta rekomendasi program intervensi. Oleh karena itu, hasil pemetaan dapat menjadi dasar bagi Kelurahan Dr. Soetomo dalam menyusun program yang lebih kontekstual, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah menghasilkan pemetaan sosial berbasis nilai-nilai Pancasila di Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, melalui survei kepada 150 warga, observasi, pemetaan partisipatif, wawancara mendalam, dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki potensi sosial yang cukup baik, ditandai dengan interaksi antarwarga, praktik gotong royong, kelembagaan sosial yang berjalan, serta aktivitas ekonomi UMKM. Meskipun demikian, ditemukan

kesenjangan kondisi sosial antara RW 1–7 dan RW 8–14, baik dari sisi karakteristik masalah, tingkat partisipasi, maupun potensi wilayah. Berdasarkan hasil AHP, tiga masalah sosial dengan prioritas tertinggi yang perlu ditangani adalah rendahnya partisipasi warga dalam musyawarah, kendala permodalan dan kapasitas pelaku UMKM, serta ketimpangan pemerataan fasilitas umum dan pelayanan sosial. Capaian ini telah sesuai dengan tujuan kegiatan, yaitu tersedianya data pemetaan sosial yang akurat sebagai dasar penyusunan rekomendasi program penguatan Kampung Pancasila yang kontekstual bagi setiap wilayah. Keberlanjutan kegiatan disarankan diarahkan pada pelaksanaan program intervensi sesuai prioritas yang telah dipetakan, disertai pemutakhiran data secara berkala oleh pihak kelurahan.

Daftar Referensi

- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2025). Surabaya dalam angka 2025.
- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. *World Development*, 22(9), 1253–1268.
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets. ACTA Publications.
- Mulyadi, M., & Kuncoro, E. A. (2021). Pemetaan sosial sebagai instrumen perencanaan pemberdayaan masyarakat perkotaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(2), 145–158.
- Nugroho, K., & Sari, D. P. (2022). Modal sosial dan harmoni komunitas di kampung kota: Studi kasus di Surabaya. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 18(3), 201–215.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2024). Profil Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari.
- Suharto, E. (2014). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Refika Aditama.
- United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development.